

LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TRIWULAN IV
TAHUN 2025



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan IV Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai pelaksanaan PPID serta evaluasi terhadap kinerja PPID dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Laporan Monev Triwulan IV Poltekkes Kemenkes Denpasar di masa mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Monev ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Denpasar, 5 Januari 2026
TIM PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes NIP.
1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi pemerintahan diwujudkan melalui kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh badan publik bertanggung jawab menyediakan data yang valid, akurat, dan dapat dipercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelayanan publik.

Sebagai salah satu badan publik, Poltekkes Kemenkes Denpasar telah mendirikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Unit ini memegang peran krusial dalam mengorganisasi, menyiapkan, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat luar. Keberadaan portal PPID ini diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak publik untuk mendapatkan data secara cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada.

Guna menjaga mutu dan konsistensi layanan ini agar senantiasa berjalan searah dengan standar operasional yang baku, agenda monitoring serta evaluasi wajib digelar secara berkala. Kegiatan pengawasan internal ini difungsikan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan dokumentasi, memantau alur birokrasi, sekaligus memetakan setiap hambatan teknis yang muncul di lapangan.

Secara spesifik, agenda monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan IV Tahun 2025 ini bertujuan untuk meninjau performa pelayanan selama periode berjalan. Evaluasi mencakup rekapitulasi jumlah permohonan data beserta durasi penyelesaiannya, mengurai akar kendala operasional, serta merumuskan rekomendasi strategis demi perbaikan kualitas layanan publik ke depan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Triwulan IV meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kegiatan tersebut mencakup pelayanan permohonan informasi publik dari masyarakat, pengelolaan dan dokumentasi informasi publik, publikasi informasi melalui media resmi institusi, serta penanganan pengaduan yang berkaitan dengan layanan

informasi publik. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

C. Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan IV difungsikan untuk meninjau kepatuhan layanan keterbukaan informasi publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar terhadap aturan yang berlaku. Agenda ini juga bertujuan untuk mengawasi tata kelola dokumentasi, mengukur efisiensi pelayanan bagi masyarakat, serta memetakan hambatan operasional yang muncul di lapangan. Melalui hasil pengawasan akhir tahun ini, diharapkan tersedia rekomendasi strategis yang valid guna mengoptimalkan mutu pelayanan informasi pada periode anggaran berikutnya.

D. Manfaat

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID memberikan berbagai manfaat bagi institusi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui kegiatan ini, institusi dapat mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan layanan informasi yang telah berjalan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan program peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat terlaksana secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II

TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI

1. Rekomendasi yang Diberikan

Meninjau capaian monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan IV, manajemen mencatat beberapa poin krusial yang perlu dibenahi demi mengoptimalkan tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Salah satu poin utama yang direkomendasikan adalah pengembangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Penguatan kompetensi ini menjadi instrumen penting agar para petugas PPID memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pelayanan, tata cara kearsipan data publik, hingga regulasi hukum yang mengatur keterbukaan informasi. Melalui langkah mitigasi ini, diharapkan mutu pelayanan data bagi masyarakat dapat terealisasi secara lebih responsif, efisien, serta akuntabel

2. Tindak Lanjut yang Dilakukan

Sebagai bentuk respons terhadap rekomendasi yang diajukan, telah dilaksanakan program penguatan wawasan serta kompetensi bagi aparatur PPID melalui pembinaan internal dan sinergi lintas unit kerja terkait tata kelola serta penyediaan data publik. Di samping itu, personel PPID diwajibkan untuk mendalami peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi agar seluruh mekanisme operasional tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Aksi mitigasi ini diharapkan mampu mendongkrak mutu pengarsipan dokumen sekaligus memperkuat kesiapan petugas PPID dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Realisasi atas program tindak lanjut ini akan terus diawasi secara berkala pada agenda monitoring dan evaluasi di periode berikutnya

BAB III

PENCAPAIAN DAN PERBAIKAN

1. Pencapaian dari Tindak Lanjut

Berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Triwulan IV, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi internal antara petugas PPID dengan unit kerja terkait dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan informasi publik.

Selain itu, petugas PPID juga mulai meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan informasi publik melalui pembinaan internal serta penguatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan informasi kepada masyarakat dapat diberikan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Upaya tindak lanjut tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik. Proses pengelolaan informasi menjadi lebih terkoordinasi dan respons terhadap permohonan informasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

2. Masalah yang Masih Dihadapi

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang masih ditemui adalah keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID.

Selain itu, proses pengumpulan data dan informasi dari unit kerja terkadang masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi kecepatan penyediaan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan komitmen dari seluruh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas petugas PPID, penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta pengelolaan sistem informasi yang lebih terintegrasi guna mendukung pelayanan informasi publik yang lebih optimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan IV di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, secara umum kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan permohonan informasi publik dapat dilaksanakan secara responsif dan transparan, serta didukung dengan koordinasi antara petugas PPID dan unit kerja terkait dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, antara lain melalui penguatan koordinasi internal serta peningkatan pemahaman petugas PPID terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sistem pengelolaan informasi agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.

2. Saran

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan PPID melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, maupun pembinaan terkait pengelolaan informasi publik. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat.

Di samping itu, pemanfaatan media informasi dan teknologi juga perlu terus ditingkatkan guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik. Dengan adanya berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes